# GEREJA UNIVERSAL – HAM UNIVERSAL?

J.B. BANAWIRATMA, SJ

Gambaran mengenai Gereja sebagai masyarakat sempurna *(societas perfecta)* telah lama ditinggalkan, sebab Gereja memang membutuhkan pembaruan terus-menerus. Sejalan dengan itu diperkembangkan gambaran hidup menggereja yang terbuka. Menurut para Uskup Asia keterbukaan Gereja diwujudkan dalam dialog dengan kaum miskin, dengan agama-agama, dan dengan budaya-budaya. Gambaran Gereja tidak lagi bersifat mono-kultural, melainkan multi-kultural; kehidupan menggereja merupakan persekutuan dari paguyuban-paguyuban (*communion of communities*). Semakin tampaklah bahwa Gereja universal bukanlah Gereja yang terkurung dalam uniformitas, melainkan yang *terwujud dalam pluriformitas dan yang terbuka untuk serta diperkaya oleh semua budaya.*

Mengenai hak-hak asasi misalnya, Gereja belajar dari *kenyataan dunia beserta pergulatannya* dan *menafsirkannya dalam cahaya Injil.* Dengan bahasa Konsili Vatikan II, Gereja harus membaca *tanda-tanda zaman*, artinya melihat kenyataan-kenyataan dunia dan menyinarinya dengan Injil Yesus Kristus. Pada tahun 1963 dalam ensiklik *Pacem in Terris* Paus Yohanes XXIII menyatakan penghargaannya terhadap deklarasi mengenai hak-hak asasi yang dikeluarkan oleh PBB pada tahun 1948. Penghargaan semacam itu tahun 1979 diulangi lagi oleh Paus Yohanes Paulus II dalam ensiklik *Redemptor Hominis*, kemudian 1987 dalam ensiklik *Sollicitudo Rei Socialis* dan tahun tahun 1991 dalam ensiklik *Centesimus Anus*. Dilihat dari terang Injil, gerakan memperjuangkan hak-hak asasi manusia tidak hanya merupakan gerakan yang dapat dipertanggungjawabkan, melainkan menjadi panggilan dan tanggung jawab orang beriman.

Dalam tulisan singkat ini akan ditawarkan pemahaman mengenai hak asasi manusia dengan belajar dari *pengalaman budaya kosmis-holistis*. Percakapan mengenai hak asasi manusia di Indonesia selama Orde Baru sering diberi keterangan dengan pemahaman khusus Indonesia dan ditekankan kesatuannya dengan kewajiban. Sebenarnya, menekankan kewajiban tidaklah meleset andaikata pemahaman kewajiban itu dimengerti dengan kerangka berpikir yang utuh, yaitu dalam *paradigma holistik* secara konsisten. Sayangnya, kekhususan hubungan dengan kewajiban itu diterangkan sedemikian rupa sehingga dapat digunakan untuk membenarkan hak orang kuasa dan kuat serta kewajiban rakyat kecil dan lemah. *Jer basuki mawa béa* (demi kesejahteraan diperlukan korban) kemudian berarti orang kecil dan lemah *wajib* menjadi korban, sedangkan orang besar dan kuat *berhak* menikmati keuntungan. Dengan kata lain, pemahaman mengenai hak asasi manusia dipakai untuk melegitimasikan penghisapan dan penindasan.

Pertimbangan berikut akan mengemukakan pemahaman mengenai hak asasi manusia dan agama dengan paradigma holistik.[1] Paradigma holistik juga memasukkan dimensi pengalaman akan Yang Ilahi, dan oleh karenanya kiranya lebih mudah untuk menggambarkan kenyataan agama yang mengacu pada pengalaman itu. Paradigma holistik-kosmis berbeda dengan paradigma sekular-mekanistik. Secara sederhana perbedaan itu dapat digambarkan sebagai berikut.

| **Paradigma sekular-mekanistik** | **Paradigma kosmis-holistik** |
|---|---|
| 1. Kenyataan dunia ini dilihat sebagai yang berbeda dengan Yang Ilahi, dan didekati secara terpisah dari pengalaman akan Yang Ilahi itu, meskipun barangkali Yang Ilahi tidak ditolak. | 1. Kenyataan dunia ini dilihat sebagai yang menyatu dengan Yang Ilahi, dan didekati secara utuh dalam kesatuan dengan Yang Ilahi. |
| 2. Alam merupakan *instrumentum* (sarana) untuk menyembah Yang Ilahi. Manusia, tanpa memperhitungkan unsur dan perspektif perempuan, menguasai dan mengolah alam sebagai ketaatan kepada Yang Ilahi. | 2. Alam merupakan *sacramentum* (tanda) dari kehadiran Yang Ilahi, Yang dialami melalui bentuk ungkapan perempuan dan laki-laki. Unsur dan perspektif perempuan masuk dalam pengalaman akan Yang Ilahi. |

| | |
|---|---|
| 3. Individu ditekankan, bahkan merupakan titik tolak dan orientasi dalam memandang kenyataan hidup. | 3. Komunitas – termasuk ciptaan non-human – merupakan titik tolak dan orientasi dalam memandang kenyataan hidup. |
| 4. Keluhuran martabat dan hak manusia terutama dimengerti secara individual. | 4. Keluhuran martabat manusia dimengerti dari tanggung jawab untuk menempatkan diri dalam dan ikut serta memelihara alam semesta. |
| 5. Keseluruhan sama dengan jumlah dari bagian-bagian. Setiap sistem atau struktur merupakan bagian-bagian yang terisolir, otonom, tidak bertali-temali. | 5. Keseluruhan lebih besar daripada jumlah bagian-bagian. Segala sesuatu merupakan bagian-bagian yang secara terus-menerus bertali-temali, suatu proses yang ditandai oleh interdependensi dan kooperasi timbal balik. |
| 6. Metafor dasariah adalah mesin. | 6. Metafor dasariah adalah *holon* (keseluruhan). |
| 7. Modifikasi dan perubahan diakibatkan oleh atau terjadi dari luar. Perubahan atau perbaikan menuntut interferensi dan manipulasi mekanis. | 7. Semua bentuk kehidupan mempunyai potensi khusus (*innate*) untuk mengatur diri. Perubahan dan penyembuhan diakibatkan oleh atau terjadi dari dalam, atau barangkali oleh pelaku perubahan dari luar. |
| 8. Setiap aspek dipelajari melalui observasi, kuantifikasi, pemotongan, dan manipulasi. Ada dominasi penalaran logis rasional terhadap daya-daya manusiawi lainnya. | 8. Karena keseluruhan lebih besar daripada jumlah dari bagian-bagian, maka pengertian manusia selalu parsial dan harus selalu terbuka untuk pengertian baru dan lebih penuh. Untuk itu digunakan daya imajinasi. |
| 9. Mesin dapat dikontrol, segala sesuatu digambarkan dengan proses mekanis. | 9. Semua potensi terbuka dalam proses, yang ditempatkan dan dipelihara dalam keseluruhan. |

Memandang kenyataan dunia dengan paradigma yang satu akan menghasilkan gambaran yang berbeda dari gambaran yang diungkapkan dengan paradigma yang lain. Jalan pikiran dan struktur argumentasinya juga berbeda. Ihwalnya bukanlah mana yang benar dan mana yang salah, melainkan mana yang lebih komunikatif dan lebih berguna bagi komunitas kontekstual. Rupanya dalam konteks Indonesia dan Asia umumnya, paradigma holistik lebih mengena. Masing-masing paradigma mempunyai kekuatan dan kelemahannya. Kelemahan paradigma holisitik-kosmis dengan tekanan pada aspek sosial-religius misalnya sering dimanfaatkan oleh pemerintah Orde Baru melalui ideologi kesatuan, harmoni, kekeluargaan, maupun penggunaan agama bagi program pemerintah.

## Citra dari Yang Ilahi: Bertanggung Jawab Ikut Memelihara Ciptaan

Agama, tradisi Kristiani misalnya, sering menghubungkan hak asasi manusia dengan keluhuran martabatnya sebagai citra Allah. Dalam kerangka berpikir itu hak asasi manusia merupakan tuntutan dari keluhuran martabat manusia dan selanjutnya keluhuran martabat manusia didasarkan pada kenyatan bahwa manusia adalah citra Allah. Citra Allah dipahami secara individual dan oleh karenanya hak asasi manusia juga dipahami secara individual. Kecuali itu, manusia juga menguasai ciptaan non-human.

Penafsiran ulang mengenai citra Allah mengemukakan aspek-aspek sosial dan aspek *gender* sekaligus; citra Allah bukanlah hanya laki-laki, melainkan laki-laki dan perempuan. Dikemukakan juga aspek pemeliharaan ekologis yang melekat pada citra Allah itu. Dengan kata lain, terdapat kecenderungan interpretasi yang semakin holistik.

Paradigma holistik mengartikan manusia citra Allah sebagai kesatuan kolektif, sebagai *corporate personality*. Sebagai citra Allah manusia ikut serta menanggung pemeliharaan kreatif terhadap alam semesta. Dengan demikian makhluk non-human langsung mendapat tempat dalam tanggung jawab manusia. Cerita sekitar penciptaan dalam Kitab Kejadian tidak menampilkan hak, melainkan kewajiban untuk menjaga saudara (*lih.* Kej 4:9). Keluhuran manusia tidak menjadi sumber hak, melainkan dilihat dari tanggung jawabnya. Jalan pikirannya bukanlah: Manusia citra Allah, maka bermartabat luhur, dan oleh karena itu mempunyai hak-hak asasi. Paradigma holistik mengemukakan jalan pikiran demikian: Manusia citra Allah, maka mempunyai *tanggung jawab bersama* untuk memelihara ciptaan dan di situlah keluhuran martabat manusia ditentukan.

Di mana tempat hak individu? Hak individu merupakan seruan: "Dalam keseluruhan alam semesta ini saya mempunyai tempat untuk hidup serta berkembang, dan saya hendak berpartisipasi sebagai wujud tanggung jawab saya. *Jangan merampas tempat dan partisipasi saya.*" Dalam paradigma holistik, percakapan mengenai kewajiban terutama mempunyai arah dari yang kuat dan kuasa menuju yang lemah, menderita dan tak berdaya. Sedangkan kewajiban yang lemah dan tidak berdaya adalah memberdayakan diri dan menuntut partisipasi.

## Yang Tidak Mendapat Tempat dan Paling Menderita: Arah Tanggung Jawab dan Titik Tolak Hak

Kepedulian utama akan hak-hak asasi adalah menyuarakan jeritan orang-orang yang tertindas dan tidak berdaya. Dari perspektif ini tepatlah Robert F. Drinan memberi judul bukunya mengenai hak-hak asasi manusia dengan *Cry of the Oppressed* (1987).[2] Mereka itu mengalami situasi dan perlakuan yang tidak manusiawi. Dari situ muncul imperatif etis "jangan merampas hak-hak asasi mereka", "jangan membiarkan situasi dan perlakuan yang tidak manusiawi". Hak-hak asasi bukanlah ihwal penerapan kebenaran-kebenaran abstrak pada situasi konkret, melainkan kenyataan bahwa apa yang *humanum* konkret, yang terdapat dalam kebudayaan tertentu, terdapat juga pada semua orang, pada semua kebudayaan.

Hak-hak asasi mencakup segi-segi kehidupan yang sangat luas seperti hak atas hidup, hak atas makanan, hak-hak ekonomis, hak-hak politis dan kultural, hak atas kebebasan beragama. Dalam pernyataan-pernyataan ajaran Gereja Katolik mengenai hak-hak asasi misalnya, terdapat pergeseran tekanan, yakni dari daftar yang inklusif, yang memasukkan hak-hak asasi manusia secara sangat luas, ke penegasan mengenai dua butir pokok yang sekarang ini semakin mendesak, yakni *hak atas perkembangan* dan *hak atas partisipasi*.

Bermacam-macam hak tidaklah tanpa tegangan satu sama lain. Dunia pertama mempunyai perspektif yang berbeda dengan dunia ketiga. Dunia pertama lebih merasakan kebutuhan untuk memperjuangkan hak-hak sipil dan politis, dan lebih mengumandangkan hak yang menyangkut *kebebasan*. Landasannya adalah *the freedom of the individual person*. Sedangkan dunia ketiga lebih memperjuangkan hak untuk perkembangan, hak yang menyangkut *kebutuhan pokok hidup manusia*, yakni makan, sandang, tempat tinggal, kesehatan, dan pendidikan. Perumusan masalah secara ekstrem adalah manakah yang lebih mendesak dan harus diperjuangkan lebih dahulu, *kebebasan atau ma-*

*kanan.* Pilihannya adalah hak-hak mereka yang tidak mempunyai kedua-duanya, tidak mempunyai makanan maupun kebebasan. Mereka yang miskin dan lapar-telantar biasanya juga tidak mempunyai kebebasan untuk berpartisipasi dalam keputusan-keputusan ekonomis maupun politis. Maka dari itu, dalam memperjuangkan hak asasi manusia, hak-hak mereka itulah yang diprioritaskan.

Perbedaan refleksi mengenai hak-hak asasi antara dunia pertama dan dunia ketiga ternyata menemukan tanpa titik temu.[3] David Hollenbach, seorang teolog dari Weston School of Theology, Cambridge, Massachusetts, USA, sangat terkesan, bahwa dalam suatu refleksi teologis dari dunia ketiga, misalnya yang dibuat oleh Gustavo Gutierrez dari Peru, tidak muncul istilah keluhuran martabat manusia dan hak-hak asasi manusia. Namun, pada waktu yang sama kita juga terkesan, bahwa refleksi Hollenbach tidak menekankan individu, yang biasa ditekankan oleh tradisi Barat. Pemikiran Hollenbach menampilkan titik temu antara dunia pertama dan dunia ketiga, yakni pada *preferential option for the poor*, pilihan mendahulukan kaum miskin. Dia mengusulkan, bahwa perkara hak-hak asasi harus menjadi perkara *prioritas*, bukan hanya perkara yang umum-umum saja. Dia merumuskan tiga prioritas moral yang strategis, yakni:

(a) Kebutuhan orang miskin mempunyai prioritas atas keinginan orang kaya.
(b) Kebebasan orang tertindas mempunyai prioritas atas kebebasan orang yang berkuasa.
(c) Partisipasi kelompok-kelompok marginal mempunyai prioritas atas pelestarian tata masyarakat yang mengesampingkan mereka.

Kaum miskin juga yang paling menjadi korban kalau terjadi kerusakan lingkungan hidup, sebab mereka tidak mempunyai sumber alternatif untuk hidup. Memperjuangkan hak-hak asasi manusia menjadi satu dengan memperjuangkan pemeliharaan makhluk non-human. Sebagaimana kita lihat di atas, dalam paradigma holistik terdapat hubungan langsung antara manusia dengan ciptaan non-human. Titik temu percakapan mengenai hak asasi manusia dari dunia pertama dan dari dunia ketiga sebenarnya dapat diperkuat dengan pemahaman dalam paradigma holistik.

### Dialog dan Kerja Sama: Tanggung Jawab Asasi

Sewajarnya kalau para pemeluk agama berkeyakinan bahwa agama yang dipeluknya merupakan agama yang paling dapat dipertanggung-

jawabkan. Seandainya tidak demikian, selayaknya pemeluk agama itu meninggalkan agamanya. Keyakinan itu tidak berarti bahwa dirinya berada dalam keadaan sempurna dalam mengerti dan menempatkan Yang Ilahi bagi beserta seluruh kenyataan hidup. Dalam paradigma holistik, setiap orang, setiap kelompok mempunyai sumbangan dalam keseluruhan dan keseluruhan lebih besar daripada jumlah bagian-bagian. Tanpa kesanggupan untuk menerima sumbangan dari yang lain, orang atau kelompok akan dirugikan dan merugikan keseluruhan. *Dialog dan kerja sama antarorang dan umat beragama merupakan kewajiban dan tanggung jawab asasi*. Hal itu tidak berarti mengambil sikap "semua agama sama saja". Seandainya semua sama saja, maka satu sama lain tidak saling memperkaya. Semua mempunyai sumbangan satu terhadap yang lain, justru karena tidak semua sama saja.

Dialog dan kerja sama sebagai tanggung jawab asasi tidak hanya berlaku dengan orang dan umat yang beragama lain, melainkan juga dengan orang dan umat dalam agama yang sama. Hal ini semakin jelas kalau kita tempatkan dalam pengalaman manusiawi akan Yang Ilahi. Pengalaman akan Yang Ilahi terjadi dalam paradoks langsung dan tidak langsung (*mediated immediacy*). Orang mengalami Yang Ilahi secara langsung, tidak hanya menurut kata orang dan tidak diwakili oleh orang lain. Namun, pengalaman itu terjadi melalui mediasi, entah itu orang lain, teks Alkitab, atau barang-barang dan kejadian di dunia ini. Pengalaman itu tidak pernah *exhaustive* dan final. Orang tidak pernah mampu menguasai Yang Ilahi. Praktek hidup beragama merupakan mediasi untuk pengalaman akan Yang Ilahi itu. Meskipun praktek agama menawarkan pengalaman langsung akan Yang Ilahi, namun tetap merupakan mediasi yang terbatas. Maka dari itu, agama lain dan pengalaman orang lain dapat memperkaya keterbatasan hidup beragama masing-masing orang dan masing-masing umat.

Dialog dan kerja sama memang merupakan tuntutan sosiologis dalam kehidupan bersama. Namun, tidak hanya itu. Semoga pertimbangan-pertimbangan yang dikemukakan dalam paradigma holistik di sini dapat mengangkat aspek-aspek lain yang mendasar dan berguna untuk memperkembangkan pengalaman religius dan kehidupan beragama.

# CATATAN

1 *Bdk.* A. Pieris, *Fire and Water*. Maryknoll, NY. Orbis Books, 1996, hlm.15-28. D. O'Murchu, *Our World in Transition. Making Sense of a Changing World*. Sussex, The Book Guild Ltd,1997, hlm. 17-26. J.B. Banawiratma dan J. Mueller, *Berteologi Sosial Lintas Ilmu. Kemiskinan Sebagai Tantangan Hidup Beriman.* Yogyakarta, Kanisius, 1993, hlm. 98-99 dan 173-189.

2 Robert F. Drinan, *Cry of the Oppressed: The History & Hope of the Human Rights Revolution*. San Franscisco, Harper & Row,1987.

3 Lihat Robert A. Evans & Alice Frazer Evans, *Human Rights*, A Dialogue between the First and Thirds Worlds, Maryknoll, NY, Orbis Books, 1983. David Hollenbach, *Claims in Conflict: Retrieving and Renewing the Catholic Human Rights Tradition*. New York, Paulist 1979; *Justice, Peace & Human Rights*, New York, Cross Road, 1988. A. Pieris, "Human Rights Language and Liberation Theology", dlm. *Expanding the View, Gustavo Gutierrez and the Future of Liberation Theology,* Ed. by H. Ellis and Otto Maduro, Maryknoll, NY, Orbis Books, 1988, hlm.157-170.